

Community Empowerment pada Program One Product One RW (OPOR) Di Kota Cimahi

Dewi Kurniasih^{1*}; Apriani Puti Purfini²

¹Prodi Ilmu Pemerintah Universitas Komputer Indonesia, Kota Bandung, Indonesia;

²Prodi Komputerisasi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia, Kota Bandung, Indonesia;

Email: dewikurniasih010575@gmail.com^{1*}; aprianippurfini@email.unikom.ac.id²

Abstract

The purpose of this study is to optimize the community empowerment model in Cimahi City through the One Product One RW (OPR) program after the Covid-19 pandemic. After the Covid-19 pandemic, Cimahi City became one of the cities in West Java Province affected by the Covid-19 pandemic. Through the implementation of the OPOR program, the community in each RW is increasingly competitive and able to realize a prosperous Cimahi City. The research method used is a descriptive method with a Mixed Method Sequential Explanatory model approach. The data collection and processing process will be more dominant using a quantitative approach, supported by an explanation of the qualitative approach. The survey results were processed using SPSS version 20 and Ms. Excel, while interview data were processed using NVivo12. The results of the study for the quality of implementation of the One Product One RW (OPOR) Program in Cimahi City in 2023 were at an implementation quality score of 85. This score indicates that the quality of implementation of the OPOR program is high. This was identified that the highest value was in the dimension of suitability between user groups and OPOR implementing organizations with an implementation quality score of 86.8. As many as 93% of respondents agreed that the OPOR Program needs to be evaluated if it is to be continued and as many as 88.4% of respondents agreed that the OPOR Program will be continued. This value shows that more respondents want the OPOR Program to be evaluated first before being continued. The continuation of the OPOR Program by considering the grouping of participants based on their business clusters. This is because the implementation of OPOR in 2023 is considered to combine the fashion cluster with food, beverage, and craft values unfair in terms of assessment weight.

Keywords: *Community; Empowerment, OPOR*

Pendahuluan

Pembangunan sumber daya manusia melalui community empowerment menjadi salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Pemberdayaan (empowerment) merupakan pendekatan secara langsung dengan melibatkan masyarakat (Hidayat & Suhartini, 2018). Jaan Lee hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemberdayaan artinya masyarakat mendapatkan kepercayaan untuk merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan diri dan ekonomi (Lee, 2017). Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisi

saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat di masing-masing RW bisa berdaya guna dan mandiri (Endah, 2020). Pemberdayaan masyarakat melalui sumber daya desa dapat membantu manajemen, inovasi, dan kewirausahaan bagi industri dan pemilik usaha, melestarikan lingkungan bagi petani, memotivasi pekerja, dan meningkatkan kemampuan administrasi perangkat (Sartika, 2019). Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan dalam pembangunan sumber daya manusia yang dapat menjadi faktor kunci dalam menciptakan daya saing (Setiawan, 2016). Daya saing masyarakat perlu stimulus dengan menciptakan potensi unggulan di wilayah masing-

masing dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat (Novitasari, 2022). Begitu halnya dengan program padat karya yang merupakan salah satu model pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan (Afdaludin & Setiawati, 2023). Pemberdayaan masyarakat di Kota Cimahi masih terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam hal jumlah pemberdayaan lembaga yang tidak mengalami perkembangan; pelaksanaan pengarusutamaan gender yang belum optimal dan kepekaan perencanaan terkait isu gender masih rendah; strategi pemberdayaan belum sensitif pada isu-isu inklusif gender, outcome pemberdayaan belum dievaluasi secara optimal, kegiatan masih seremonial dan perempuan belum mampu memahami dan menginspirasi isu-isu sensitif gender. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi menemukan program pemberdayaan khususnya pada sektor ekonomi yakni berupa bantuan individu dan bantuan kelembagaan belum sepenuhnya berhasil, dominasi dalam pelaksanaan oleh pihak pemerintah daerah membuat program tidak berjalan secara maksimal (Umanailo, 2019). Pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan perlu juga didorong, terutama dalam hal urusan budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga (Sartika, 2019). Peningkatan pemberdayaan masyarakat akan berdampak berkurangnya permasalahan sosial di Kota Cimahi. Dalam rangka untuk memberikan pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan pemodelan yang sesuai

dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di Kota Cimahi.

Berkaitan dengan pemberdayaan, perlu ditinjau kembali penduduk miskin di Kota Cimahi pada periode 2015 sampai dengan 2022 selalu berada pada kisaran angka 4 – 5% dengan angka terakhir di tahun 2022 sebesar 5,11% yang dapat dikatakan terdapat peningkatan sebagaimana pada tahun 2021 sebesar 5,35%. Angka kemiskinan mengalami tren menurun sampai dengan tahun 2019 yang mencapai 4,39%, namun angka kemiskinan Kota Cimahi kembali meningkat pada tahun 2020 yang mencapai 5,11% dan tahun 2021 sebesar 5,35%. Dapat diartikan bahwa jumlah tersebut setara dengan 31,2 ribu jiwa warga miskin di Kota Cimahi. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial diperlukan efektifitas sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negatif dari berbagai bencana sosial dan kebijakan ekonomi (Siagian et al., 2022).

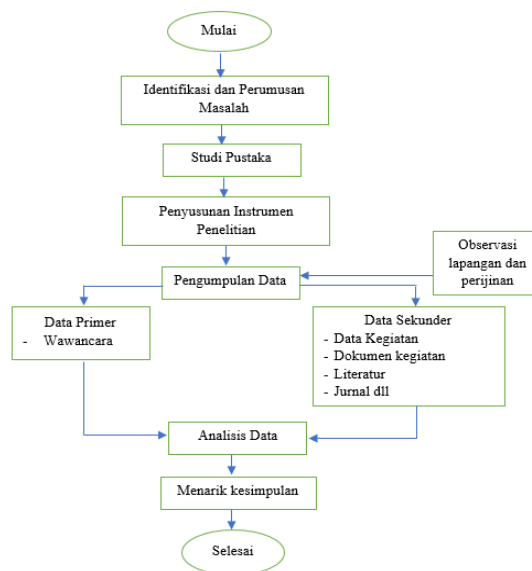
Program penanggulangan kemiskinan dewasa ini lebih mengandalkan kreativitas dan prakarsa masyarakat di daerah (Malik & Mulyono, 2017). Pemerintah pusat yang sebelumnya sangat dominan dalam program penanggulangan kemiskinan, kini harus berubah menjadi sekedar pemberi fasilitas dan pendampingan-pendampingan bagi program-program penanggulangan kemiskinan (Malik & Mulyono, 2017). Intervensi Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkaitan masalah kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan mengeluarkan paket kebijakan diantaranya berupa program One Product One RW. Adapun program One Product One RW, ditetapkan melalui keputusan

Wali Kota Cimahi No. 500/kep.994-ekosda/2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan One Product One RW, Peduli Lingkungan Bersih dan Padat Karya. Paket kebijakan tersebut sejatinya bukan program yang baru, karena dalam periode – periode sebelumnya sudah terlaksana. Namun demikian, belum terdapat gambaran mengenai community empowerment pada program One Product One RW (OPOR) yang diselenggarakan Pemerintah Kota Cimahi. Berkaitan dengan uraian di atas, dalam kajian ini penulis hendak menyusun sebuah kajian dengan judul “community empowerment pada Program One Product One RW di Kota Cimahi”.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengoptimalkan model pemberdayaan masyarakat di Kota Cimahi melalui program One Product One RW (OPR) pasca pandemic Covid-19. Pasca pandemic Covid-19, Kota Cimahi menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang terkena dampak pandemic Covid-19. Diharapkan dengan dilaksanakannya kembali program OPOR, masyarakat dapat lebih berdaya guna dan mampu berdaya saing menciptakan Kota Cimahi yang sejahtera. Melalui program OPOR, community empowerment dapat terselenggara dengan baik dimana pada masing-masing RW di Kota Cimahi mampu berinovasi dengan menciptakan produk usaha sendiri sehingga mampu menunjang pembangunan pemerintah Kota Cimahi. Mitra dari penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi. Melalui kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk rencana pembangunan daerah Kota Cimahi di tahun mendatang.

Metode

Tahapan Penelitian Skema bagan alir dalam tahapan penelitian community empowerment pada Program One Product One Rw (OPOR) di Kota Cimahi pada gambar 1.



Gambar 1 Bagan Diagram Alir

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan pendekatan model Mixed Method Sequential Explanatory, dimana menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Craswel (2010) menjelaskan bahwa penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif.

Dalam strategi eksplanatoris sekuensial, tahap pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot maupun prioritas ini diberikan pada data kuantitatif.

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan penelitian kuantitatif dalam teknik

pengumpulan data karena penelitian kualitatif juga termasuk jenis dari "field research approach", di mana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan "field research approach" adalah teknik pengumpulan data penelitian yang total dilakukan di lapangan (Nasution & Suriani, 2022).

Sumber data pada metode penelitian mix method dapat dibedakan kepada data primer dan data sekunder (Haryono, 2023). Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: (1) metode survei dan (2) metode observasi. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Umar, 2003).

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data, tehnik pengumpulan data yang biasanya dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah Observasi, Pedoman Wawancara, Angket dan Dokumentasi. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive, dimana bahwa teknik ini adalah merupakan bagian dari nonprobability yaitu teknik penentuan informan yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur dalam penentuan informan. Informan sendiri yaitu: Peserta Program OPOR, Peserta Program Padat Karya,

Pendamping (fasilitator) Kelurahan dan RW, Pelaksana pada Dinas terkait pada lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Lokasi penelitian dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas dan RW-RW yang terkait dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian Kualitas Implementasi Program OPOR

Pengujian Keabsahan Data

Pengumpulan data primer telah dilaksanakan melalui survey dan wawancara. Jumlah response yang masuk untuk kuesioner Program OPOR sebanyak 89 (delapan puluh sembilan). Dari jumlah tersebut kemudian disesuaikan dengan jumlah kebutuhan responden berdasarkan tabel penentuan informan, terdapat penyesuaian jumlah dan komposisi responden pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Responden Kualitas Implementasi Program OPOR

Kelurahan	Populasi (Ketua RW)	Sampel	Realisasi Responden
Cibeber	14	4	4
Cibeureum	29	8	8
Leuwigajah	20	6	6
Melong	36	10	10
Utama	16	4	4
Baros	25	7	7
Cigugur Tengah	19	5	5
Cimahi	10	3	3
Karang Mekar	17	5	5
Padasuka	21	6	6
Setiamanah	18	5	5

Cibabat	25	7	7
Cipageran	29	8	8
Citeureup	19	5	5
Pasirkaliki	14	4	4
Jumlah	12	86	86

Sumber : Diolah penulis, 2023.

Dari responden tersebut kemudian dilakukan Uji Validitas kepada kuesioner Kualitas Implementasi Program OPOR. Dari hasil pengujian validitas menunjukkan seluruh respon memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel.

Dengan tabel 1 untuk 86 responden adalah 0,278 dan seluruh r hitung memiliki validitas dengan besaran di atas r tabel (hasil perhitungan uji validitas terlampir). Sementara untuk Uji Reliabilitas kuesioner Kualitas Implementasi Program OPOR menunjukkan seluruh respon pada indicator memiliki reliabilitas tinggi dengan nilai 0.944 yang berarti lebih besar dari nilai Cronbach Alpha (α) 0,6 sebagaimana terlihat pada tabel 2.

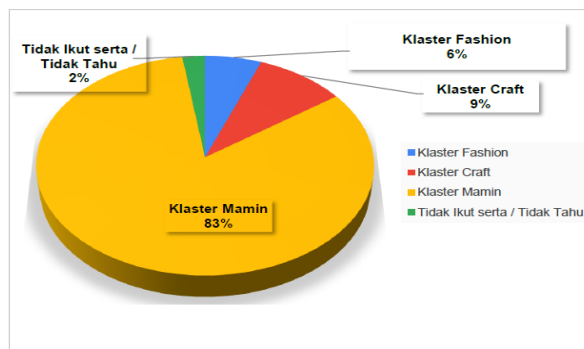
Tabel 2. Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Kualitas Implementasi Program OPOR

Cronbach's Alpha	N of Items
0.944	26

Sumber : Diolah penulis, 2023.

Hasil Kuesioner Kualitas Implementasi Program OPOR

Berdasarkan hasil Kuesioner Kualitas Implementasi Program OPOR dapat terlihat sebaran klaster ekonomi yang diajukan oleh masing-masing RW pada tingkat kelurahan. Rekapitulasi yang disajikan dalam bentuk diagram pie pada gambar 2.

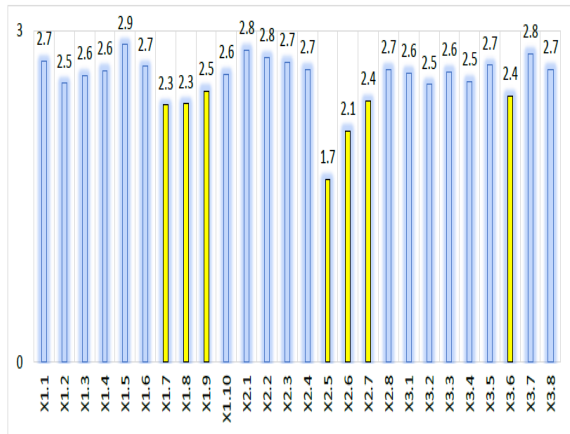


Gambar 2. Sebaran Klaster pada Program OPOR 2023

Sumber: Olahan Penulis, 2023.

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa Klaster Mamin atau Makanan dan Minuman menjadi Klaster terbanyak dengan 83%. Diikuti klaster Craft atau Kerajinan dengan 9% dan Klaster Fashion 6%, sementara sisanya 2% responden menyatakan tidak ikut serta atau tidak tahu. Dengan didominasinya Klaster Makanan dan minuman ini membuat mayoritas juara Program OPOR pada tiap kelurahan berasal dari klaster Mamin. Kondisi tersebut yang kemudian berdasarkan hasil wawancara menjadi kurang sesuai dengan kehendak pimpinan dan juga konsep dari Program 3 in 1 (OPOR, Padat Karya dan Ompimpah).

Berdasarkan hasil kuesioner kualitas implementasi program OPOR diketahui bahwa mayoritas indikator berada pada skor lebih dari 2,50 yang berarti menunjukkan kualitas implementasi yang baik. Jika nilai berada di bawah 2,5 menunjukkan kecenderungan jawaban responden yang menilai bahwa indikator tertentu Kurang Sesuai/kurang baik dan Tidak sesuai/tidak baik. Sementara jika nilai berada di atas 2,5 menunjukkan kecenderungan jawaban responden yang menilai bahwa indikator tertentu sudah sesuai atau sudah baik. Seperti dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Gambar 3. Rekapitulasi Nilai Kualitas Implementasi Program OPOR
Sumber : Olahan Penulis, 2023.

Namun demikian tidak seluruh indikator berada pada kondisi baik karena masih terdapat 7 (tujuh) indikator yang berada pada skor di bawah 2,50 atau sama dengan kondisi kualitas implementasi yang kurang baik terlihat pada gambar 3. Adapun indikator tersebut meliputi:

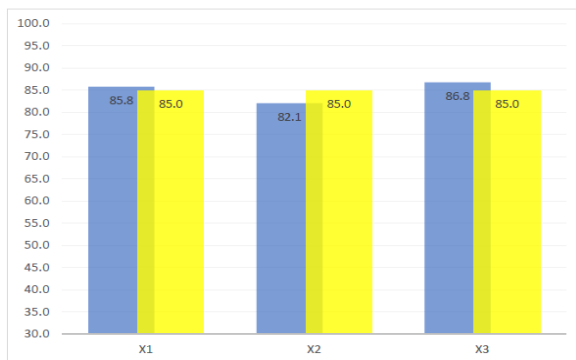
- 1) Indikator X1.7 Kesesuaian antara program dan pemanfaatan. Pernyataan: Kebutuhan kelompok RW saya terpenuhi melalui Program OPOR. Dengan nilai rata-rata 2,30 di bawah 2,50 berarti responden cenderung menilai bahwa kebutuhan kelompok RW peserta tidak terpenuhi melalui Program OPOR.
- 2) Indikator X1.8 Kesesuaian antara program dan pemanfaatan. Pernyataan: Kebutuhan identifikasi dan pengembangan produk RW saya terpenuhi melalui OPOR. Dengan nilai rata-rata 2,30 di bawah 2,50 berarti responden cenderung menilai bahwa kebutuhan identifikasi dan pengembangan produk RW peserta tidak terpenuhi melalui OPOR.
- 3) Indikator X1.9 Kesesuaian antara program dan pemanfaatan. Pernyataan: Terdapat kesesuaian antara yang ditawarkan oleh program OPOR dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dengan nilai rata-rata 2,50

sama dengan 2,50 berarti responden menilai tidak terdapat kesesuaian antara yang ditawarkan oleh program OPOR dengan kebutuhan kelompok sasaran.

- 4) Indikator X2.5 Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Pernyataan: Produk RW saya mendapatkan juara 3 besar
- 5) Indikator X2.6 Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Pernyataan: Terdapat pembinaan lanjutan dari program OPOR. Dengan nilai rata-rata 2,10 di bawah 2,50 berarti responden menilai tidak ada pembinaan lanjutan dari program OPOR.
- 6) Indikator X2.7 Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Pernyataan: Menurut saya program OPOR sudah sesuai dengan kebutuhan kami. Dengan nilai rata-rata 2,40 di bawah 2,50 berarti responden menilai program OPOR belum sesuai dengan kebutuhan pelaksana.
- 7) Indikator X3.6 Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Pernyataan: Kelompok RW saya sudah berkontribusi terhadap pencapaian output program OPOR. Dengan nilai rata-rata 2,40 di bawah 2,50 berarti responden menilai Kelompok RW peserta belum berkontribusi terhadap pencapaian output program OPOR.

Rentang nilai pada angka 2 menunjukkan persepsi responden terhadap indikator yaitu kurang sesuai/kurang baik. Pembulatan nilai sama dengan atau di bawah 2,50 cenderung kepada nilai 1 atau ketidaksesuaian sementara pembulatan nilai lebih dari 2,50 cenderung mengarah kepada kesesuaian dari indikator. Dengan demikian didapatkan 7 indikator yang masih dinilai kurang sesuai atau

mengindikasikan kualitas implementasi pada level sedang. Namun demikian, terdapat indikator dengan nilai paling besar yaitu pada indikator X1.5 yang mewakili persepsi kesukarelaan peserta mengikuti Program OPOR dengan pernyataan "Saya secara sukarela mengikuti Program OPOR". Hal ini menunjukkan adanya kesukarelaan peserta untuk mengikuti program OPOR.



Gambar 4. Nilai Kualitas Implementasi Program OPOR Per Dimensi

Sumber : Olahan Penulis, 2023.

Gambar 4 menggambarkan rekapitulasi atas kualitas implementasi program OPOR yang terdiri atas tiga dimensi yaitu Dimensi Kesesuaian Antara Program OPOR Dan Pemanfaat, Dimensi Kuesioner Kesesuaian Antara Program OPOR Dengan Organisasi Pelaksana dan Dimensi Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR berada pada nilai kualitas implementasi 85. Nilai 85 untuk kualitas implementasi Program OPOR menunjukkan kualitas implementasi yang tinggi berdasarkan kepada pembagian nilai Three Box Method dengan rincian jika nilai 33,00% – 55,00% termasuk kategori kualitas implementasi Rendah, nilai 56,00% – 78,00% termasuk kategori kualitas implementasi Sedang, dan nilai 79,00% – 100,00% termasuk kategori kualitas implementasi Tinggi.

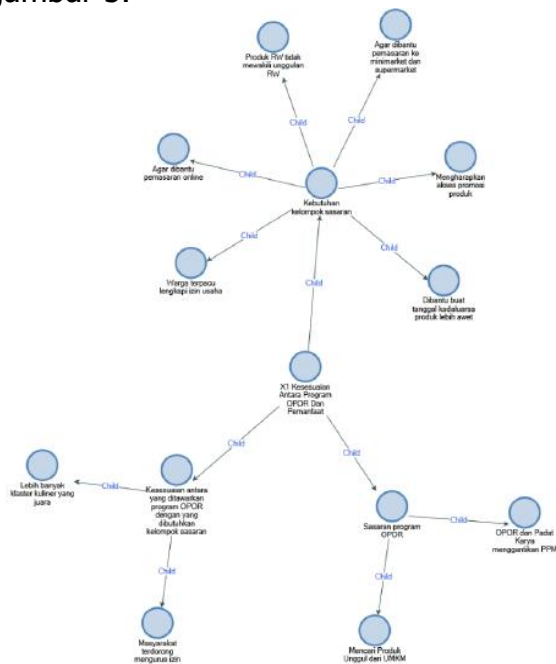
Berdasarkan hasil pengolahan data gambar 3 dapat diidentifikasi bahwa X1 mewakili Dimensi Kesesuaian Antara

Program OPOR Dan Pemanfaat, X2 mewakili Dimensi Kuesioner Kesesuaian Antara Program OPOR Dengan Organisasi Pelaksana dan X3 mewakili Dimensi Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR. Dapat diidentifikasi bahwa nilai tertinggi ada pada dimensi X3 yang mewakili Dimensi Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR dengan nilai kualitas implementasi sebesar 86,8. Sementara nilai yang berada di bawah nilai rata-rata variabel yaitu ada pada dimensi X2 mewakili Dimensi Kuesioner Kesesuaian Antara Program OPOR Dengan Organisasi Pelaksana, namun masih tetap berada di atas rata-rata nilai variabel.

Hasil Pengumpulan Data Kualitatif untuk Kualitas Implementasi Program OPOR

Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan membuat transkrip berdasarkan hasil rekaman wawancara terhadap informan (Anufia & Alhamid, 2019). Dari hasil transkrip tersebut kemudian dilakukan pengolahan data meliputi reduksi data dan coding. Coding dilakukan menggunakan Aplikasi pengolahan data kualitatif NVivo Versi 12. Hasil pengolahan data hasil wawancara menggunakan Tree Map Coding menunjukkan kotak yang berukuran lebih besar berarti memiliki komposisi tema bahasan yang lebih banyak disebutkan. Tematisasi yang dilakukan menggunakan instrumen wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga memiliki keterkaitan antar dimensinya. Dari gambar di atas dapat dilihat kotak berwarna biru dengan keterangan X2 Kesesuaian Program OPOR dengan Organisasi Pelaksana memiliki dominansi dalam wawancara dibandingkan dimensi X3 Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana.

Nodes merupakan simpul yang berisi kata kunci dari pengolahan coding hasil wawancara kualitas implementasi Program OPOR. Nodes merupakan representasi konseptual kode yang menurut penulis signifikan selama proses analisis menggunakan NVivo. Nodes tersebut kemudian diklasifikasi berdasarkan kesamaan tema atau topik bahasan kualitas implementasi Program OPOR. Melalui nodes ini kemudian dapat dianalisis temuan – temuan pada proses penelitian yang dianggap penting, sehingga mencakup juga dalam proses reduksi data berkaitan kualitas implementasi Program OPOR. Hasil dari wawancara terhadap informan dapat digambarkan melalui nodes mapping gambar 5.



Gambar 5. Nilai Kualitas Implementasi Program OPOR Per Dimensi
Sumber : Olahan Penulis, 2023

Pembahasan Kualitas Implementasi Program OPOR

Kesesuaian Antara Program OPOR Dan Pemanfaat

Dalam rangka penanganan terhadap dampak perekonomian, langkah Pemerintah Daerah Kota Cimahi

menerbitkan program One Product One RW yaitu program menggali potensi ekonomi berbasis kewilayahan di tingkat Rukun Warga yang dapat diingat menjadi produk unggulan daerah. Program ini dalam rangka tindak lanjut dari upaya pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional. Secara lebih detail, pada Dimensi Kesesuaian Antara Program OPOR Dan Pemanfaatan menekankan kesesuaian antara tujuan yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran atau pemanfaat atau dalam hal ini masyarakat yang mengikuti Program OPOR.

Tabel 3. Hasil Kuesioner Kesesuaian Antara Program OPOR Dan Pemanfaat

Pernyataan	Skala Jawaban (xi)			Jumlah (Σfi)	Skor Total (Σfi.xi)	Skor Ideal	Rata-rata	
	TS / TB	KS / KB	S / B					
X1.1	fi	3	18	65	86	234	258	2.72
	%	3.5	20.9	75.6	100	90.7		
X1.2	fi	13	15	58	86	217	258	2.52
	%	15.1	17.4	67.4	100	84.1		
X1.3	fi	9	17	60	86	223	258	2.59
Pernyataan	Skala Jawaban (xi)			Jumlah (Σfi)	Skor Total (Σfi.xi)	Skor Ideal	Rata-rata	
	TS / TB	KS / KB	S / B					
X1.4	%	10.5	19.8	69.8	100	86.4	258	2.64
	fi	10	11	65	86	227		
	%	11.6	12.8	75.6	100	88.0		
X1.5	fi	2	7	77	86	247	258	2.87
	%	2.3	8.1	89.5	100	95.7		
X1.6	fi	8	12	66	86	230	258	2.67
	%	9.3	14.0	76.7	100	89.1		
X1.7	fi	15	28	43	86	200	258	2.33
	%	17.4	32.6	50.0	100	77.5		
X1.8	fi	13	31	42	86	201	258	2.34
	%	15.1	36.0	48.8	100	77.9		
X1.9	fi	10	27	49	86	211	258	2.45
	%	11.6	31.4	57.0	100	81.8		
X1.10	fi	4	26	56	86	224	258	2.60
	%	4.7	30.2	65.1	100	86.8		
Rata-rata					85.8			2.6

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa pada Dimensi Kesesuaian Antara Program OPOR Dan Pemanfaat dari 10 pernyataan yang disajikan kepada 86 responden memiliki rata-rata nilai 2,57 yang berarti responen menilai Dimensi Kesesuaian Antara Program OPOR Dan Pemanfaat sudah sesuai. Namun demikian, terdapat 3 pernyataan yang dianggap kurang sesuai karena memiliki nilai di bawah 2,50.

Tabel 3 dapat dilihat bahwa indikator X1.1 hingga indikator X1.10 sudah berada pada tingkat kualitas

implementasi tinggi, kecuali untuk Indikator X1.7 dan X1.8 yang mewakili persepsi responden terkait keterwakilan pemenuhan kebutuhan kelompok peserta melalui Program OPOR. Indikator dengan nilai paling besar yaitu pada indikator X1.5 yang mewakili persepsi kesukarelaan peserta mengikuti Program OPOR dengan pernyataan "Saya secara sukarela mengikuti Program OPOR". Hal ini menunjukkan adanya kesukarelaan peserta untuk mengikuti program OPOR. Untuk itu, kesukarelaan peserta dapat menjadi salah satu pelung modal sosial bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk melanjutkan Program OPOR.

Indikator X1.7 ditanyakan Kesesuaian antara program dan pemanfaatan. Dari indikator tersebut responden menilai kebutuhan kelompok RW peserta tidak terpenuhi melalui Program OPOR. Data tersebut relevan dengan pernyataan dari informan pihak kelurahan yang menyatakan bahwa dalam Program OPOR, produk yang diajukan cenderung kepada produk UMKM yang diproduksi secara rumahan, artinya belum masif mencapai tingkat RW atau menjadi sentra pada tingkat RW. Dari hasil wawancara kepada pihak kelurahan pada 3 kecamatan di Kota Cimahi diketahui bahwa kelompok UMKM yang mengikuti Program OPOR memiliki harapan untuk dapat difasilitasi usahanya, mulai dari kemudahan perizinan, pengembangan kompetensi, fasilitasi promosi dan fasilitasi pemasaran. Namun demikian dengan bentuk kegiatan dalam format lomba membuat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.

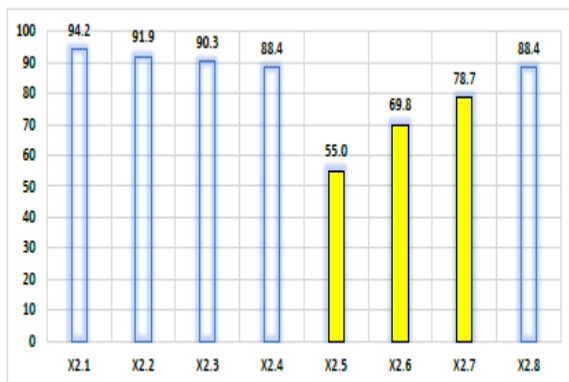
Indikator X1.8 Kesesuaian antara program dan pemanfaatan, pada pernyataan "Kebutuhan identifikasi dan pengembangan produk RW saya terpenuhi melalui OPOR" memiliki nilai rata-rata di bawah 2,50 berarti responden menilai kebutuhan identifikasi dan pengembangan produk RW peserta tidak

terpenuhi melalui OPOR. Hal ini relevan dengan fenomena yang terjadi pada Kelurahan Melong, Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Setiamanah yang pada tingkat RW memiliki lebih dari satu potensi produk yang ingin diajukan. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan pada Kelurahan diketahui bahwa identifikasi dan pengembangan produk kurang optimal dilakukan karena dari berbagai produk potensial di tingkat RW, diambil keputusan oleh rembug warga bahwa produk UMKM yang paling lengkap memenuhi persyaratanlah yang diajukan.

Indikator X1.9 Kesesuaian antara program dan pemanfaatan pada pernyataan "Terdapat kesesuaian antara yang ditawarkan oleh program OPOR dengan kebutuhan kelompok sasaran" memiliki nilai rata-rata di bawah 2,50 berarti responden menilai tidak terdapat kesesuaian antara yang ditawarkan oleh program OPOR dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kelompok sasaran dalam hal ini UMKM di tingkat RW memiliki kebutuhan dalam hal kemudahan perizinan (misal NIB, PIRT dan Halal), fasilitasi pemasaran, fasilitasi promosi dan fasilitasi peningkatan kapasitas UMKM. Namun demikian kebutuhan tersebut belum terakomodir dalam Program OPOR. Pelaksanaan sebuah kebijakan bukan hanya berkaitan dengan mekanisme untuk dapat mengubah keputusan dari sebuah kebijakan menjadi suatu prosedur yang menjadi rutinitas pelaksana kebijakan melalui saran yang diberikan oleh pihak birokrasi (Kurniasih & Umar, 2022). Lebih dari itu, implementasi membahas pula berbagai permasalahan yang menjadi suatu konflik, serta siapa saja pihak yang menjadi penerima kebijakan yang sudah tercipta (Haris, 2014).

Kesesuaian Antara Program OPOR dengan Organisasi Pelaksana

Dimensi Kesesuaian Antara Program OPOR Dengan Organisasi Pelaksana terdiri dari 8 indikator pernyataan. Dimensi ini menekankan kepada kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana dalam hal ini Disdagkoperin, Kecamatan, Kelurahan, Binwil (Pendamping) Perangkat Daerah dan Ketua RW. Dari delapan pernyataan yang disajikan, masih terdapat pernyataan atau indikator yang menurut responden belum memiliki kesesuaian.



Gambar 6. Nilai Dimensi Kesesuaian Antara Program OPOR Dengan Organisasi Pelaksana

Dimensi X2.5 pada gambar 4, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana pada pernyataan "Produk RW saya mendapatkan juara 3 besar kelurahan" memiliki nilai rata-rata di bawah 2,50 berarti responden menilai produknya tidak masuk dalam juara 3 besar tingkat kelurahan karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan panitia. Terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi menjadi alasan responden memiliki penilaian minor terhadap indikator tersebut, yaitu: Mengacu kepada persyaratan produk yang diajukan dalam OPOR, terdapat ketimpangan antara produk dari klaster makanan minuman dengan produk klaster kerajinan atau craft dan dengan

produk pada klaster fashion atau pakaian. Jumlah produk klaster makanan mendominasi program OPOR sebagaimana dilihat pada diagram sebelumnya produk klaster mamin mencapai 83%. Penilaian juri untuk ketiga klaster yang digabung menyebabkan persaingan tidak seimbang. Misalnya, dalam aspek pemberdayaan dengan bobot 40% meliputi jumlah Tenaga Kerja dan Pelibatan Aspek Sekitar pada klaster mamin akan berbeda dengan klaster craft dan fashion. Produk klaster craft cenderung memiliki jumlah tenaga kerja lebih sedikit. Penilaian juri pada Aspek Ekonomi dengan bobot 30 % meliputi Potensi Pasar dan potensi produk pada klaster mamin akan berbeda dengan klaster craft dan fashion.

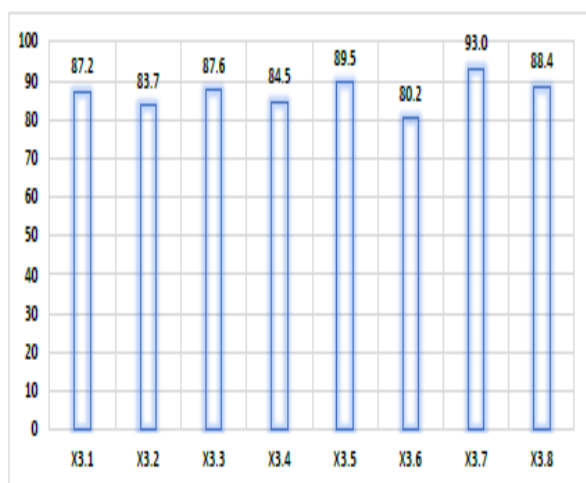
Dimensi X2.6 Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana pada pernyataan "Terdapat pembinaan lanjutan dari program OPOR" memiliki nilai rata-rata di bawah 2,50 berarti responden menilai tidak ada pembinaan lanjutan dari program OPOR. Kegiatan pembinaan lebih fokus pada pra pelaksanaan kegiatan, dimana RW berembung untuk menentukan produk unggulan yang akan diajukan. Adapun informasi yang didapatkan dari pihak kelurahan, para pemenang akan difasilitasi dari kelurahan berupa pelatihan dan mengikuti kegiatan bazaar Culinary night, dan Para Pemenang akan difasilitasi dari perangkat daerah berupa fasilitasi pengembangan usaha sesuai dengan kebutuhan untuk direalisasikan pada tahun anggaran ke depan.

Dimensi X2.7 Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana pada pernyataan "Menurut saya program OPOR sudah sesuai dengan kebutuhan kami (pelaksana)". Dengan nilai rata-rata di bawah 2,50 berarti responden menilai program OPOR belum sesuai dengan kebutuhan pelaksana.

Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana OPOR

Dimensi Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR terdiri dari 8 indikator. Dimensi ini menekankan kepada Kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok sasaran program dalam hal ini pelaku UMKM dan RW. Dimensi Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR memiliki nilai rata-rata 2,60 yang diartikan bahwa mayoritas responden menilai terdapat kesesuaian pada dimensi Kesesuaian Antara Kelompok.

Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR. Dari 8 indikator yang disajikan melalui pernyataan kepada responden, mayoritas responden menilai dimensi Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR sudah memiliki kesesuaian kecuali untuk indikator nomor X3.6 Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana pada pernyataan "Kelompok RW saya sudah berkontribusi terhadap pencapaian output program OPOR".



Gambar 7. Nilai Dimensi Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR

Berdasarkan gambar 7 diketahui bahwa pada indikator X3.7 yang mewakili

persepsi peserta yang menilai perlu ada evaluasi program OPOR menunjukkan 93% responden setuju jika Program OPOR perlu dievaluasi jika akan dilanjutkan. Selaras dengan indikator X3.8 yang mewakili persepsi peserta untuk keberlanjutan program OPOR bahwa 88,4% responden setuju Program OPOR dilanjutkan. Dengan perbandingan dua nilai tersebut menunjukkan bahwa responden lebih cenderung menginginkan program OPOR untuk dievaluasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Adapun tujuan dari kegiatan One Product One RW adalah sebagai berikut: mendorong pemberdayaan masyarakat agar mempunyai produk unggulan (barang atau jasa) serta mampu mandiri secara ekonomi, menjadikan One Product One RW sebagai produk unggulan wilayah, mengkolaborasi antara pelaku usaha yang unggul agar berdampak pada ekonomi masyarakat, mendorong potensi ekonomi di wilayah yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan melahirkan para pelaku usaha mikro yang akan menjadi penopang ekonomi masyarakat Kota Cimahi yang tangguh.

Baik kelompok RW maupun Pendamping dari PNS Esselon VI memiliki peran dalam kesuksesan kegiatan OPOR. Namun demikian di lapangan masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian seperti masih terdapat pendamping yang tidak turun mendampingi RW, Pendamping hanya mendampingi untuk salah satu program saja (misal hanya program OPOR saja), masih terdapat pendamping yang tidak melaporkan secara berjenjang.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas implementasi untuk program OPOR belum dapat dikatakan memiliki kualitas implementasi yang baik, kendati sudah memiliki kesesuaian pada dimensi X1 Dimensi Kesesuaian Antara Program OPOR Dan

Pemanfaat dan Dimensi X3 Dimensi Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR, namun Dimensi X2 Dimensi Kesesuaian Antara Program OPOR Dengan Organisasi Pelaksana dinilai masih belum sesuai atau dapat dikatakan kualitas implementasi belum baik.

Kesimpulan

Kualitas implementasi Program One Product One RW (OPOR) di Kota Cimahi tahun 2023 yang terdiri atas tiga dimensi yaitu Dimensi Kesesuaian antara Program OPOR dan Pemanfaat, Dimensi Kuesioner Kesesuaian Antara Program OPOR Dengan Organisasi Pelaksana dan Dimensi Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR berada pada nilai kualitas implementasi 85. Nilai 85 untuk kualitas implementasi Program OPOR menunjukkan kualitas implementasi yang tinggi. Dapat diidentifikasi bahwa nilai tertinggi ada pada dimensi X3 yang mewakili Dimensi Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana OPOR dengan nilai kualitas implementasi sebesar 86,8. Sementara nilai yang berada di bawah nilai rata-rata variabel yaitu ada pada dimensi X2 mewakili Dimensi Kuesioner Kesesuaian Antara Program OPOR Dengan Organisasi Pelaksana, namun masih tetap berada di atas rata-rata nilai variabel.

Responden dan informan setuju Program One Product One RW (OPOR) di Kota Cimahi dilanjutkan dengan melihat indikator dengan nilai paling besar yaitu pada indikator X1.5 yang mewakili persepsi kesukarelaan peserta mengikuti Program OPOR. Ditambah pada indikator X3.7 yang mewakili persepsi peserta yang menilai perlu ada evaluasi program OPOR menunjukkan 93% responden setuju jika Program OPOR perlu dievaluasi jika akan dilanjutkan. Selaras dengan indikator X3.8 yang mewakili persepsi peserta

untuk keberlanjutan program OPOR bahwa 88,4% responden setuju Program OPOR dilanjutkan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden lebih cenderung menginginkan program OPOR untuk dievaluasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Jika Program OPOR hendak dilanjutkan terdapat catatan yaitu perlu ada pengelompokan peserta berdasarkan klaster usahanya, karena dari implementasi OPOR pada tahun 2023 dinilai penggabungan klaster fashion dengan makanan minuman dan craft nilai tidak adil dari segi bobot penilaian. Klaster Makanan dan Minuman cenderung memiliki bobot yang lebih besar karena lebih banyak untuk dipenuhi. Program pembinaan lanjutan dari Program OPOR belum didapatkan oleh masyarakat pada tahun anggaran yang sama dikarenakan data base program OPOR belum masuk kepada Disdagkoperin Kota Cimahi dan Bagian Ekosda Setda Kota Cimahi, sehingga belum terdapat analisis terhadap data base tersebut. Meskipun dipayungi oleh satu payung hukum dan surat tugas yang satu, namun tidak terdapat hubungan antara kualitas implementasi program OPOR dengan kualitas kualitas implementasi program Padat Karya. Dampaknya yaitu tidak tercipta fungsi koordinasi yang dimiliki oleh Bagian Ekosda pada Setda Kota Cimahi.

Daftar Pustaka

- Afdaludin, A., & Setiawati, B. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa Dengan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *JAPB*, 6(1), 70–80.
- Afrizal, M. A. (2014). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019).

- Instrumen pengumpulan data.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter*, 13(2).
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
- Hidayat, D. H., & Suhartini, T. (2018). Community Empowerment dan Product Branding "SEKHUIT" Makanan Khas Daerah Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 1(2), 138–155.
- Kurniasih, D., & Umar, M. (2022). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 8(1), 1–18.
- Lee, Y.-J. (2017). Building resilient cities through community empowerment: principles and strategies for Taiwan. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 5(2), 35–46.
- Malik, A., & Mulyono, S. E. (2017). Pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 87–101.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nasution, I., & Suriani. (2022). Pengamalan Ajaran Suluk Tarekat Naqsyabandiyah Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184–204.
- Sartika, I. (2019). Village Resources Based Community Empowerment. *International Journal of Kybernology*. <https://doi.org/10.33701/ijok.v3i1.580>
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: perspektif potensi wisata daerah berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 23–35.
- Siagian, N., Zagoto, D., & Situmorang, I. B. K. (2022). Implikasi Pelaksanaan Reses Anggota DPRD terhadap Daerah Pemilihan di Kabupaten Nias Selatan. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 73–87.
- Umanailo, M. C. B. (2019). Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]. *Proceeding of Community Development*, 2, 268–277.
- Umar, H. (2003). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta, Jakarta.